

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang namanya diganti Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Melalui kebijakan ini Presiden menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan menyusun rencana strategis (Renstra) yang diganti namanya menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang mengacu pada RPJP Nasional.

Instumen yang digunakan instansi pemerintahan dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan visi dan misi organisasi, adalah melalui sistem laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis (Renstra/RPJM), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).

Sebagai implementasi dari penjabaran kegiatan tahunnya diharuskan menyusun dahulu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang didalamnya merupakan penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja serta targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra DPKD Propinsi Sumbar Sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, rencana kerja juga memuat rancangan kerangka ekonomi prioritas pembangunan daerah dan pendanaanya.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) juga merupakan rencana awal pembangunan, yang selanjutnya kegiatan tersebut dipertanggung jawabkan dengan

membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) yang menggambarkan hasil capaian dari rencana kegiatan yang telah dilaksanakan.

Penyusunan Rencana kerja (Ranja) tahun ini dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang berhasil guna, transparan, bersih, serta bertanggung jawab yang merupakan persyaratan bagi pemerintah Propinsi Sumbar untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Disamping itu tersusunnya Rencana Kerja Tahunan ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang beban tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2014 sehingga diharapkan hasilnya dapat terukur, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dinas Pengelolaan Keuangan daerah Propinsi sumbar merupakan suatu badan yang mempunyai kegiatan untuk mengatur segala yang berhubungan dengan pendapatan yang ada di kota Padang. Sehingga dalam melaksanakan kegiatannya, DPKD harus membuat Renja-SKPD yang merupakan suatu informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan untuk mengambil suatu keputusan-keputusan ekonomi agar dapat mencapai hasil yang optimal.

Dalam pelaksanaan tugasnya, DPKD Propinsi Sumbar dipimpin oleh kepala dinas yang dibantu salah satunya oleh unit pelaksana teknis dinas (UPTD) pelayanan pendapatan Propinsi di padang.

Berdasarkan hal diatas agar menjadi tenaga kerja yang siap pakai dengan daya kompetensi tinggi melalui praktek kerja lapangan, penulis memilih Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Propinsi Sumbar sebagai tempat melaksanakan kegiatan Magang. Oleh karna itu, Penulis tertarik untuk mengangkat topik yang berjudul **“RENCANA KERJA UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PROPINSI DI PADANG TAHUN 2014 PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DPKD)”**

1.2 Perumusan masalah

Bertitik tolak pada latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, agar tidak menyimpang dari tujuan penulis dalam pembahasan selanjutnya maka penulis membuat beberapa perumusan masalah yang berubungan dengan Rencana Kerja UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Padang tahun 2014 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah diantaranya:

1. Bagaimana program kerja UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Padang tahun 2014?
2. Apa apa saja yang termasuk sumber penerimaan UPTD Pelayanan Pendapatan propinsi di Padang
3. Berapa rencana terget kinerja UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Padang tahun 2014?

1.3 Tujuan dan Manfaat Kegiatan Magang

1.1.1 Tujuan Kegiatan Magang

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis antara lain:

1. Untuk mengetahui dan mempelajari proses Penyusunan Rencana Kerja UPTD pelayanan Pendapatan Propinsi di Padang pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Untuk mempraktekkan ilmu teori yang di dapat dari bangku perkuliahan ke instansi pemerintahan yang sesuai dengan jurusan penulis yaitu Keuangan Negara.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli madya (Amd) pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi Andalas Univercity Padang.
4. Memperkenalkan peserta magang pada dunia kerja sehingga peserta memiliki wawasan dan motivasi tinggi terhadap perannya di masa depan.

1.1.2 Manfaat Kegiatan Magang

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dalam kegiatan magang adalah:

1. Untuk lebih memahami dunia kerja serta mampu mengaplikasikan teori yang dapat selama perkuliahan ke instansi pemerintahan lainnya.
2. Penulis dapat mengetahui dan memahami Rencana Kerja UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Padang tahun 2014.
3. Dapat membantu instansi pemerintahan untuk menyelesaikan tugasnya.
4. Menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam berinteraksi dengan staholder di lingkungan kerja.

1.4 Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan laporan magang ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian kepustakaan

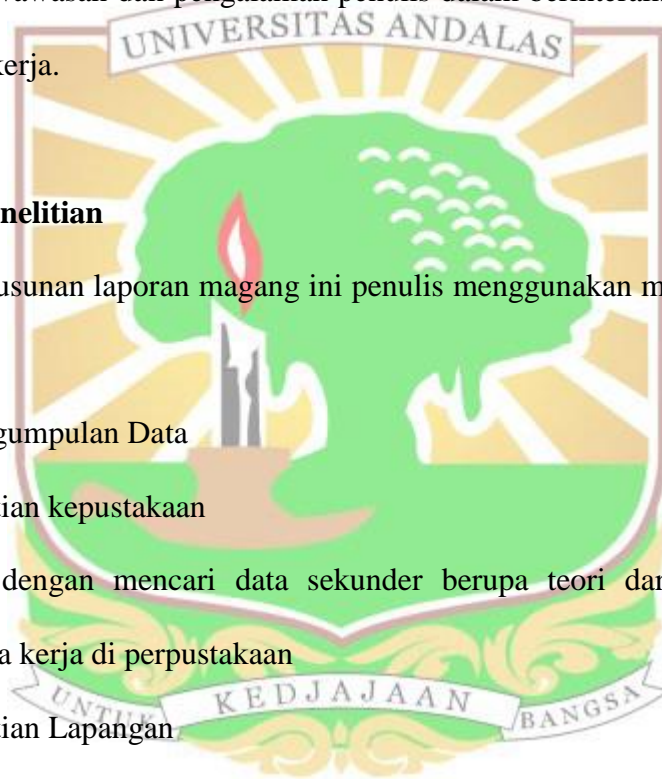
Yaitu dengan mencari data sekunder berupa teori dari buku-buku tentang rencana kerja di perpustakaan

b. Penelitian Lapangan

- Observasi/magang

Yaitu mencari data primer dan sekunder langsung kelapangan yaitu dengan mendatangi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Propinsi Sumbar selama 40 hari kerja untuk mengamati dan mencari informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Renja.

- Wawancara untuk mendapatkan data primer dengan menanyakan langsung ke bagian program dan pendapatan.



2. Metode Analisa Data

Dengan melakukan analisa terhadap data data yang di berikan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mengenai Renja baik secara kualitatif sebagai alat dalam menarik kesimpulan dengan cara membandingkan teori yang ada dengan pelaksanaanya pada Dinas itu sendiri, maupun secara kuantitatif yaitu dengan membuat anggaran rencana target kinerja tahun 2014 yang menggunakan data-data keuangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan magang ini terdiri dari 6 bab yang sistematika penulisanya adalah seperti berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

berisikan latar belakang, perumusan masalah, manfaat dan tujuan magang, serta sistematika penulisan laporan magang.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

berisikan risikan landasan teori, dasar hukum, dan bentuk kegiatan magang.

BAB III : GAMBARAN UMUM DPKD

berisikan sejarah berdirinya DPKD Propinsi Sumbar, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi.

BAB IV : PEMBAHASAN

berisikan Rencana Kerja UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Padang Tahun 2014 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V : PENUTUP

berisikan kesimpulan dari laporan magang beserta saran-saran.

